

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Badan Pengawas Keuangan Daerah, 1999, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Jakarta: Pusdiklat Was BPKP.
- Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- C.S.T Kansil, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Darwan Prints, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Evi Herawati, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, St. Paul Minesota: West Publishing.
- Indriyanto Seno Adji, 2014, *Hukum Pidana (KUHP dan KUHP)*, Perkembangan dan Permasalahan, Jakarta: Diadit Media.
- Luhut M. P. Pangaribuan, 2009, *Lay Judges & Hakim Ad Hoc. Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mardjono Reksodiputro, 1999, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/a Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia.

\_\_\_\_\_, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Moch. Faisal Salam, 2011, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju.

Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana. Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni.

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Alumni.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Salim, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Satjipto Rahardjo, 2002, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta: Sinar Grafika

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sudarto, 1996, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

Topo Santoso, 2000, *Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan?*, Jakarta: Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia.

World Bank, 1997, *World Development Report – The State in Changing World*, Washington DC: World Bank.

Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.

**b. Jurnal**

Titis Anindyajati, Irfan Nur Rachman, dan Anak Agung Dian Onita, “Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai *Ultimum Remedium* dalam Pembentukan Perundang-undangan”, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 4, (Jakarta, Desember 2015)

**c. Artikel Majalah**

Eko Hery Winarno, *APIP Dalam Pusaran Kriminalisasi*, Media Procurement Indonesia, Edisi 8 Tahun 2017

**d. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LN No 140 Tahun 1999, TLN Nomor 3874

Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, LN No 244 Tahun 2014, TLN Nomor 5587

Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, LN No 292 Tahun 2014, TLN Nomor 5601

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

**e. Internet**

<http://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/2674/16.050-Faktor-Faktor-Penyebab-Kepala-Daerah-Korupsi>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2018.

<https://nasional.kompas.com/read/2015/08/28/16000021/Kriminalisasi.Dis-kresi>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2018.

<https://nasional.kompas.com/read/2016/07/19/10495961/kumpulkan.kapol.da.dan.kajati.jokowi.blakblakan.soal.keluhan.kepala.daerah>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2018.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160719150939-32-145645/kriminalisasi-oleh-polisi-jaksa-hambat-pembangunan-daerah?>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2018.

<http://setkab.go.id/arahan-presiden-republik-indonesia-kepada-seluruh-kepala-kepolisian-daerah-dan-kepala-kejaksaan-tinggi-tahun-2016-di-istana-negara-jakarta-19-juli-2016/>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2018.

[https://nasional.kompas.com/read/2018/08/05/10101\"Modus Korupsi 32 Kepala Daerah yang Sudah Ditangkap KPK](https://nasional.kompas.com/read/2018/08/05/10101\)", di akses pada tanggal 5 Desember 2018

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5988456348404/apip-sang-pengawas--bukan-bagian-mata-rantai-korupsi/> diakses pada tanggal 12 Februari 2019

<https://kumparan.com/banjarhits/kesepakatan-apip-dan-aph-diharapkan-tak-hambat-pengusutan-hukum-27431110790558956>, diakses pada tanggal 12 Februari 2019.

<https://kumparan.com/banjarhits/kesepakatan-apip-dan-aph-diharapkan-tak-hambat-pengusutan-hukum-27431110790558956>, diakses pada tanggal 12 Februari 2019.

<https://tirto.id/mou-kemendagri-polri-kejakung-berpotensi-loloskan-koruptor-cFzU>, diakses pada tanggal 5 Desember 2018

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180302081139-12-279862/mou-kemendagri-polri-kejaksaan-potensial-picu-konflik-hukum>, diakses pada tanggal 4 Desember 2018.

<https://nasional.kompas.com/read/2015/04/01/15040051/Niat.dan.Perbuatan.Jahat.>, diakses pada tanggal 1 Januari 2019.

#### **f. Tesis dan Skripsi**

Muhammad Taufiq Akbar M, 2017, Analisis Normatif Terhadap Penggunaan Diskresi oleh Pejabat Pemerintahan dalam Hubungannya Dengan Penyalahgunaan Kewenangan Pada Tindak Pidana Korupsi, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Nurlaila Oktariana, 2017, Perlindungan Hukum Pejabat Pemerintah Dari Didakwa Melakukan Tindak Pidana Korupsi Atas Kewenangan Diskresi, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.